



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;



24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 770.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 2

Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 3

Besaran rincian Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2014



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 34

**BESARAN PENGALOKASIAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2015**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL	
			PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)
TAPIN UTARA	1	KERAMAT	5,336,374	2,009,803
	2	ANTASARI	4,666,745	1,757,605
	3	JINGAH BABARIS	3,666,667	1,380,952
	4	BANUA HANYAR	4,627,796	1,742,936
	5	BANUA HALAT KIRI	5,513,814	2,076,631
	6	BANUA HALAT KANAN	5,824,673	2,193,708
	7	PERINTIS RAYA	7,528,272	2,835,323
	8	KAKARAN	6,590,696	2,482,210
	9	ANTASARI HILIR	7,048,632	2,654,680
	10	LUMBU RAYA	3,784,531	1,425,343
	11	BANUA HANYAR HULU	6,532,825	2,460,415
	12	BADAUN	3,666,667	1,380,952
BINUANG	13	TUNGKAP	6,869,334	2,587,152
	14	A.YANI PURA	12,756,114	4,804,251
	15	PULAU PINANG	4,035,928	1,520,025
	16	PUALAM SARI	9,937,773	3,742,798
	17	GUNUNG BATU	3,666,667	1,380,952
	18	PULAU PINANG UTARA	3,831,252	1,442,939

	19	PADANG SARI	4,733,080	1,782,589
	20	MEKAR SARI	3,666,667	1,380,952
TAPIN SELATAN	21	TATAKAN	4,183,528	1,575,614
	22	SUATO TATAKAN	10,313,930	3,884,467
	23	SAWANG	6,491,844	2,444,980
	24	LAWAHAN	4,521,672	1,702,967
	25	TIMBAAN	3,666,667	1,380,952
	26	RUMINTIN	4,095,333	1,542,398
	27	CEMPAKA	3,666,667	1,380,952
	28	HARAPAN MASA	3,679,697	1,385,860
	29	TANDUI	4,277,076	1,610,847
	30	HATIWIN	3,666,667	1,380,952
TAPIN TENGAH	31	PANDULANGAN	3,676,044	1,384,484
	32	LABUNG	3,685,422	1,388,016
	33	MANDURIAN	3,666,667	1,380,952
	34	SERAWI	3,666,667	1,380,952
	35	PEMATANG KARANGAN HULU	3,666,667	1,380,952
	36	PEMATANG KARANGAN	3,921,931	1,477,091
	37	PANDAHAN	3,871,818	1,458,217
	38	PEMATANG KARANGAN HILIR	4,107,525	1,546,990
	39	HIYUNG	3,783,986	1,425,137
	40	ANDHIKA	3,666,667	1,380,952
	41	SUKARAMAI	4,353,915	1,639,786

	42	TIRIK	3,666,667	1,380,952
	43	KEPAYANG	3,676,366	1,384,605
	44	BATANG LANTIK	3,666,667	1,380,952
	45	MANDURIAN HILIR	3,666,667	1,380,952
	46	SUNGAI BAHALANG	5,232,904	1,970,834
	47	PAPAGAN MAKMUR	3,666,667	1,380,952
CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	6,482,567	2,441,486
	49	CANDI LARAS	8,366,131	3,150,881
	50	BERINGIN A	8,562,934	3,225,001
	51	MARAMPIAU	14,525,607	5,470,683
	52	PABAUNGAN HILIR	7,115,232	2,679,763
	53	PABAUNGAN HULU	7,425,743	2,796,708
	54	SUNGAI RUTAS	8,279,943	3,118,420
	55	BERINGIN B	6,165,030	2,321,895
	56	MARAMPIAU HILIR	6,010,912	2,263,850
	57	SUNGAI RUTAS HULU	6,100,325	2,297,525
	58	BAULIN	7,295,540	2,747,671
	59	PABAUNGAN PANTAI	5,673,124	2,136,631
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	26,233,312	9,880,079
	61	SUNGAI SALAI	8,663,889	3,263,023
	62	PARIOK	14,820,699	5,581,822
	63	MARGASARI HILIR	22,133,950	8,336,163
	64	BATALAS	11,332,876	4,268,226

	65	RAWANA	7,802,564	2,938,628
	66	BUAS-BUAS	9,472,145	3,567,431
	67	TELUK HAUR	9,639,611	3,630,503
	68	SUNGAI PUTING	11,597,680	4,367,957
	69	SAWAJA	5,707,111	2,149,431
	70	SUNGAI SALAI HILIR	11,818,827	4,451,246
	71	BUAS-BUAS HILIR	6,488,398	2,443,682
	72	RAWANA HULU	5,299,281	1,995,833
BAKARANGAN	73	PARIGI KACIL	6,992,050	2,633,370
	74	BAKARANGAN	3,666,667	1,380,952
	75	PARIGI	3,666,667	1,380,952
	76	PAUL	3,666,667	1,380,952
	77	GADUNG	3,666,667	1,380,952
	78	BUNDUNG	6,895,842	2,597,135
	79	TANGKAWANG LAMA	3,666,667	1,380,952
	80	WARINGIN	3,703,209	1,394,715
	81	GADUNG KERAMAT	3,666,667	1,380,952
	82	MASTA	3,686,879	1,388,565
	83	KETAPANG	3,666,667	1,380,952
	84	TANGKAWANG BARU	3,666,667	1,380,952
PIANI	85	PIPITAK JAYA	3,666,667	1,380,952
	86	MIAWA	3,666,667	1,380,952
	87	BATU AMPAR	3,666,667	1,380,952

	88	HARAKIT	4,191,674	1,578,682
	89	BATUNG	6,344,899	2,389,637
	90	BALAWAIAN	3,666,667	1,380,952
	91	BARAMBAN	3,666,667	1,380,952
	92	BUNI'IN JAYA	3,666,667	1,380,952
BUNGUR	93	KALUMPANG	5,963,289	2,245,914
	94	BANUA PADANG	4,220,771	1,589,641
	95	BUNGUR	8,736,332	3,290,307
	96	BANUA PADANG HILIR	3,866,646	1,456,269
	97	SHABAH	3,712,990	1,398,399
	98	HANGUI	6,651,639	2,505,163
	99	RANTAU BUJUR	3,724,106	1,402,585
	100	PURUT	4,504,893	1,696,648
	101	BUNGUR BARU	3,697,595	1,392,601
	102	TIMBUNG	3,666,667	1,380,952
	103	PARING GULING	3,666,667	1,380,952
	104	LINUH	3,711,713	1,397,918
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	5,491,901	2,068,378
	106	PARANDAKAN	10,903,665	4,106,575
	107	LOKPAIKAT	5,515,330	2,077,202
	108	BATARATAT	5,284,759	1,990,364
	109	BITAHAN BARU	7,192,717	2,708,945
	110	PUNCAK HARAPAN	4,882,457	1,838,847

	111	BUDI MULYA	6,494,123	2,445,838
	112	AYUNAN PAPAN	8,414,192	3,168,982
HATUNGUN	113	TARUNGIN	6,104,315	2,299,028
	114	MATANG BATAS	8,904,075	3,353,483
	115	HATUNGUN	9,887,004	3,723,677
	116	BURAKAI	7,177,002	2,703,027
	117	BATU HAPU	9,641,156	3,631,085
	118	KAMBANG KUNING	6,118,539	2,304,385
	119	ASAM RANDAH	9,313,554	3,507,702
	120	BAGAK	8,522,438	3,209,749
SALAM BABARIS	121	SALAM BABARIS	3,750,092	1,412,372
	122	SUATO LAMA	17,864,716	6,728,270
	123	KAMBANG HABANG LAMA	4,406,688	1,659,662
	124	PANTAI CABE	3,691,137	1,390,168
	125	SUATO BARU	5,965,670	2,246,811
	126	KAMBANG HABANG BARU	3,699,020	1,393,137
		TOTAL	770,000,000	290,000,000



BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN